



AKTIVITAS HUMAS PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN TATA KELOLA LEMBAGA PUBLIK

Oleh : Ivena Cika Tan

Dr. Imam Nuraryo¹

Program Ilmu Komunikasi

E-mail : ivenacikatan18@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out about the Pekalongan municipal government public relations in carrying out their duties to implement the governance of public institutions in the city of Pekalongan, Central Java. In addition, this study also aims to determine the success of the Pekalongan municipal government public relations in carrying out public governance for the Pekalongan city community. In this study the authors use a system theory which is a theory of Public Relations where this theory is open to the public about information because they establish social relations or social interaction with the community. By using the boundary spanning function which is where government organizations establish relationships between outside communities or the public or government or other internal or external organizations. From the results of the study stated that public relations Pekalongan city government works hard to build a relationship with the people of Pekalongan city, and they also provide the best service in providing data and information needed by the community because public relations is very transparent to the public regarding the data and also the information they provide for all citizens of the city of Pekalongan. The conclusion of this study is the Pekalongan city public relations government has provided excellent services to its people, especially in providing information, they do not view their people from the upper or middle class plus the governance of public institutions or good governance becomes their foundation to provide the best service to the community. and they also do not want to lose competitiveness with big cities that have implemented and implemented the governance of public institutions in their cities

Keywords : *system theory, governance of public institutions, Public Relations, Pekalongan city government public relations*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai humas pemerintahan kota Pekalongan dalam menjalankan tugas mereka untuk mengimplementasikan tata kelola lembaga publik di kota Pekalongan Jawa tengah, selain itu penelitian ini juga bertujuan dalam mengetahui keberhasilan yang dijalankan humas pemerintahan kota Pekalongan dalam menjalankan tata kelola publik untuk masyarakat kota pekalongan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sistem yang merupakan teori Public Relations yang dimana teori ini bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai informasi karena mereka menjalin hubungan sosial atau interaksi sosial kepada masyarakatnya. Dengan menggunakan fungsi boundary spanning yaitu dimana organisasi pemerintah menjalin hubungan antar masyarakat luar atau publik maupun pemerintahan atau organisasi lainnya internal atau eksternal. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa humas pemerintah kota pekalongan bekerja keras untuk membangun suatu hubungan dengan masyarakat kota Pekalongan, serta mereka juga memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan data dan juga informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan humas berlaku sangat transparan kepada masyarakat mengenai data dan juga informasi yang mereka sediakan untuk seluruh warga kota Pekalongan.

¹ Alamat Kini : Kwik Kian Gie School Of Business Jl. Yos Sudarso No. Kav 87, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 14350 Telp. (021) 65307062



Kesimpulan dari penelitian ini adalah humas pemerinthan kota Pekalongan sudah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakatnya terutama dalam memberikan informasi, mereka tidak memandang masyarakatnya dari kalangan atas atau menengah ditambah tata kelola lembaga publik atau good governance menjadi suatu tumpuan mereka untuk memerikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, serta mereka juga tidak mau kalah saing dengan kota-kota besar yang sudah menerapkan dan mengimplemetasikan tata kelola lembaga publik di kota mereka.

Kata Kunci : Teori Sistem, Tata kelola lembaga publik, Public Relations, Humas Pemerintahan kota Pekalongan

Public relations pemerintah atau lebih dikenal dengan nama Humas bukanlah sebuah jabatan yang biasa jika kita melihat secara teoritis. Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak persepsi bahwa *public relations* pemerintah (humas) sebagai pusat informasi, tukang kliping, penyelenggara kegiatan, penyambung media dan kebijakan, praktik serta konstituen organisasi. Peran *public relations* yang dianggap tidak urgensi didalam organisasi oleh banyak orang, tetapi ternyata memiliki peran yang sangat penting.

Tujuan dari keberadaan seorang Humas terlepas dari *level* dan tipe pemerintahan adalah: memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah, memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah, mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan, melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik didalam organisasi), mengelola informasi internal (newsletter, elektronik dan isu dari situs internet organisasi), memfasilitasi hubungan media (menjaga hubungan dengan pers) serta membangun komunitas dan bangsa.

Fungsi Humas telah lama dibentuk di pemerintahan, tetapi fungsi ini belum sepenuhnya efektif. Sudah jelas terlihat dari beberapa kendala yang dialami oleh seorang humas seperti persepsi sebagian besar warga menganggap pemerintah sebagai sistem yang ruwet, dipenuhi kepentingan pribadi dan korupsi.

Namun tidak dapat dipungkiri bagaimana peran public relations dalam menciptakan tata kelola lembaga publik yang akhir-akhir ini mulai diterapkan oleh pemerinta dan sebagainya. Padahal untuk menjadi seorang *public relations*

officer seseorang harus memenuhi beberapa kualifikasi yaitu kemampuan berkomunikasi secara verbal dan tulisan, kemampuan untuk menciptakan networking, kemampuan untuk berorganisasi dan kemampuan untuk berimiginasi karena dalam tugas sehari-hari public relations selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak dan harus memahami secara menyeluruh kultur, kebijakan, praktik serta konstituen organisasi.

Adapun Humas memiliki peranan penting, mulai dari pusat informasi publik, menjalin internal relations antar karyawan, berhubungan baik dengan media dan sebagainya. Dalam proses penciptaan tata kelola lembaga publik kerjasama yang solid antar karyawan sangat berpengaruh besar, karena dalam suatu organisasi jika tubuh didalamnya kuat dan menjalani tugas sesuai dengan aturan pasti akan berjalan dengan baik dan tumbuhnya organisasai yang sehat. Kebanyakan masyarakat belum mengetahui bagaimana tata kelola lembaga publik diterapkan, bahkan masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka merupakan salah satu unsur penting dalam berjalannya tata kelola lembaga publik.

Tata kelola lembaga publik dalam pemerintahan yang baik, atau dapat disebut good governance seturut kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu fungsi dan tugas tanggung jawab sebuah negara yang berkembang ataupun yang maju, begitupun dengan Indonesia yang hampir dari seluruh wilayah daerah kota baik kota kecil maupun kota besar sudah memberlakukan tata kelola lembaga publik yang baik untuk masyarakatnya.

Beberapa definisi mengenai good governance dikemukakan oleh beberapa lembaga. Salah satunya United Nation Development Program



(UNDP) atau lembaga PBB untuk pengembangan negara-negara di dunia mendefinisikan tata kelola lembaga public dalam pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian tersebut, terlihat tiga sektor utama dari kewenangan pemerintah yang kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat

Pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Berlakunya peraturan tersebut akan mengakibatkan interaksi antara aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih intensif. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas, yang bercirikan pemerintahan yang baik good governance.

Penyelenggaraan tata kelola lembaga public juga tertulis pada UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yakni adanya asas kepastian hukum memastikan bahwa hukum mengenai korupsi sangat berlangsung pada suatu pemerintahan di wilayah atau kota tersebut.

Humas pemerintahan juga harus memiliki kejelasan hak dan kewajiban providers dan masyarakat diartikan disini adalah hak-hak dan kewajiban, baik para providers maupun masyarakat harus dirumuskan secara jelas dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi, dan yang paling penting ialah efektivitas penanganan keluhan masyarakat pelayanan yang baik sedapatnya mungkin untuk menghindari suatu permasalahan atau sebuah keluhan yang datang dari masyarakat itu sendiri.

Jika muncul permasalahan atau keluhan pemerintahan atau Humas harus bisa merancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan segera ditangani dengan baik dengan Humas dan dapat diserahkan kepada bidang tertentu, contohnya masalah pembangunan maka Humas akan menyerahkan kepada pihak pembangunan dari kota tersebut.

Dalam tata kelola lembaga publik Humas juga harus memiliki layanan yang sepenuh hati untuk melayani masyarakat, pelayanan ini berdasarkan dari pelayanan yang berasal dari staff Humas yang bekerja dalam menangani pelayanan publik, pelayanan ini mempunyai wujud dari watak, emosi, keyakinan, nilai, sudut pandang, dan juga perasaan. Nilai yang sebenarnya dalam pelayanan sepenuh hati terletak pada kesungguhan empat sikap atau yang disebut dengan 4P yaitu, passionate (gairah), progressive (progresif), proactive (proaktif), dan positive (positif).

Passionate atau gairah merupakan semangat yang besar terhadap pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain, seorang Humas harus mampu membangun sikap semangat dalam melayani masyarakat dan ditambah dengan layanan dengan sepenuh hati membuat masyarakat lebih percaya dan lebih merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh humas, sikap progresif penciptaan layanan sepenuh hati yang dibuat secara unik yang meningkatkan layanan dan gaya pribadi maksudnya adalah bagaimana pribadi Humas harus lebih progresif dalam melayani masyarakat.

Dalam pelayanan publiknya Humas juga bekerja sama dengan bidang-bidang lain dalam membuat sebuah informasi publik yang ditujukan kepada masyarakat kota Pekalongan, salah satunya adalah mereka bekerja sama dengan DIKOMINFO Kota Pekalongan (Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pekalongan) merupakan salah satu penyambung dan penggerak dari Humas dikarenakan mereka menyimpan arsip penting dan informasi layanan publik di kota pekalongan. Bukan Humas saja yang dapat menyebarkan berita namun DIKOMINFO pun bersifat transparan kepada masyarakat kota Pekalongan.



Selain itu kedua lembaga publik ini juga bekerja sama dengan media lokal dan membuat situs sendiri diakrenakan zaman yang sudah semakin moderen dan juga cangih mereka juga mengikuti masyarakat yang pada dasarnya sudah menggunakan teknologi dalam mencari suatu informasi mengenai kerja dari pemerintahan sendiri, serta mereka membuat beberapa macam aplikasi yang menolong para masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kesehatan ataupun keuangan.

Kemudahan inilah yang ditawarkan oleh Humas pemerintahan kota pekalongan dikarenakan tata kelola lembaga publik adalah sebagai tumpu bagaimana pemerintah mau menjalin dan terbuka kepada masyarakat tanpa harus ada yang ditutupi, dan banyak masyarakat merasa nyaman dengan Humas pemerintahan sekarang dengan system yang menurut mereka lebih terbuka kepada masyarakatnya.

Humas sendiri juga banyak memberikan informasi dari keberhasilan Walikota Pekalongan sebagaipemimpin dan juga mampu memberikan informasi mengenai kinerja Walikota Pekalongan, sehingga tidak dianggap masyarakat tidak beranggapan mereka tidak bekerja namun mereka berusaha supaya masyarakat dapat mempercayai pemerintahan lewat Humas pemerintahan kota Pekalongan.

Maka dari itu peneliti membuat penelitian ini, dikarenakan banyak hal menarik yang bisa diambil dari dalam penelitian ini seperti bagaimana peran Humas dapat menjadi salah satu roda penggerak untuk mengimplementasikan tata kelola lembaga publik yang baik. Demikian juga berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan peneliti, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Aktivitas Humas pemerintahan kota Pekalongan Dalam Mengimplementasikan Tata Kelola Lembaga Publik”.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

1. Teori Sistem

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan dan membutuhkan satu

dengan lainnya, hal tersebut lah yang mendasari esensi dari teori sistem. Karena, pada dasarnya, teori sistem memfokuskan perhatian untuk memahami bagaimana kualitas fungsi yang dijalankan setiap sistem dalam suatu relasi dinamis dengan sistem-sistem lainnya (Kriyantono 2014: 77).

Dengan kata lain, teori sistem mengatakan bahwa hal yang penting dari teori ini adalah hubungan sosialnya. Hubungan sosial yang baik merupakan hasil (output) dari suatu interaksi sosial yang dalam hal ini adalah interaksi antara organisasi dengan publiknya. Menurut Kriyantono (2014: 77) mengatakan bahwa apabila sistem ini diterapkan, maka prinsip pokok yang berlaku yaitu organisasi merupakan salah satu bagian (subsistem) dari suatu sistem sosial yang lebih kompleks, karenanya saling berhubungan, saling tergantung, dan saling memengaruhi satu sama lainnya.

Oleh karena itu, menjalin hubungan dalam organisasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan harus diterapkan. Sebagai suatu sistem, organisasi juga harus memiliki karakteristik yang dimiliki setiap sistem sosial menurut Kriyantono (2014: 79), yaitu keseluruhan dan saling bergantung (*whoelness and interdependece*), hierarki (*hierarchy*), peraturan sendiri dan kontrol (*self-regulation and control*), pertukaran dengan lingkungan (*interchange with the environment*), keseimbangan (*balance*), perubahan dan kemampuan adaptasi (*change and adaptability*), dan sama tujuan (*equifinality*).

Menurut Heath (dalam Kriyantono, 2014: 78) mengatakan bahwa teori sistem berguna untuk memahami proses public relations. Praktisi Public Relations dapat menjadikan teori ini sebagai dasar menjalin hubungan dengan publiknya sebagaimana yang teah dikatakan oleh Grunig & Hunt (dalam Kriyantono, 2014) bahwa definisi *Public Relations* sebagai “*management of communication between an organization and it’s public*” tersebut didasarkan pada pendekatan teori sistem atas public relations.



Teori ini juga menganggap bahwa aktivitas organisasi mengakibatkan konsekuensi (dampak) bagi publiknya. Dengan kata lain, Public Relations memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan hubungan dengan publiknya dan hasil yang akan didapat di publiknya seperti citra dan reputasi organisasi itu sendiri.

Teori sistem juga memiliki fungsi boundary spanning merupakan fungsi yang membantu berjalannya suatu sistem, Dalam sebuah organisasi boundary spanning merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang organisasi kepada publik. Muhammad (2005:128) menjelaskan bahwa boundary spanning adalah “tingkatan dimana para anggota tim melakukan komunikasi dengan pihak luar tim”. Pada sebuah organisasi, “pihak luar tim” berarti publik di luar struktur organisasi. Kegiatan ini dilakukan agar tidak terjadi salah paham antara organisasi dengan publik mengenai isu-isu yang tengah beredar mengenai organisasi.

Tujuan fungsi boundary spanning adalah membangun sistem komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik. Hal ini akan membuat publik tidak merasa dikucilkan dan meminimalisir tindakan-tindakan publik yang akan merugikan organisasi. Komunikasi dua arah akan mempermudah organisasi dalam membuat suatu keputusan agar dapat mewadahi keinginan dan kebutuhan publiknya.

Dapat dikatakan boundary spanning juga sangat bermanfaat di ranah kegiatan pemerintahan, terutama pada humas pemerintahan Kota Pekalongan yang dimana mereka menyambung komunikasi mereka secara publik atau luas. Komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan baru yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan.

Boundary spanning juga dilibatkan sebagai salah satu interaksi pemerintah (organisasi) dengan publiknya, menurut Kriyantono (2014 : 77) bahwa komunikasi yang harus dilakukan haruslah secara luas atau tidak bergantung dengan interaksi internal dan proses tetapi

melainkan harus melakukan interaksi dengan kelompok lainnya

Teori sistem juga memiliki beberapa bentuk seperti teori sistem sosial dari Katz dan Khan (1961) menurut mereka struktur sosial berbeda dengan struktur mekanis dan struktur biologis, jika suatu sistem sosial berhenti maka tidak mempunyai struktur terpisah dari kegiatannya. Teori ini menyadari bagaimana suatu keadaan yang terorganisasikan perlu mengenal berbagai hambatan untuk mengurangi komunikasi secara acak ke saluran-saluran yang sesuai untuk pencapaian tujuan organisasi.

2. Fungsi Public Relations

Peran *public relations* dalam pemerintahan juga menjadi salah satu fungsi manajemen yang membangun dalam mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan masyarakat yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam organisasi pemerintahan tersebut, peran *profesi public relations* semakin bias tanpa adanya spesialisasi profesi sehingga diharapkan seorang praktisi humas memahami peranya dengan baik, bukan hanya pelengkap kerja dan pekerjaan rangkap seorang sekretaris direksi. Konsep peranan petugas humas yang dikembangkan oleh Broom (1989), yang dikembangkan oleh Broom dan juga Smith mengatakan bahwa peran humas atau public relations merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi humas dan komunikasi organisasi.

Fungsi *public relations* sendiri terdapat dua jenis yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif yang membedakan kedua fungsi ini adalah fungsi konstruktif merupakan fungsi yang diamanakan peran humas dalam hal ini mempersiapkan mental dari publik atau masyarakat untuk menerima suatu kebijakan pemerintah untuk mengetahui kepentingan publik, mengevaluasi perilaku publik ataupun organisasi, menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, percaya dan salaing membantu terhadap tujuan tata kelola lembaga publik atau organisasi pemerintahan yang dia wakikan.



Sedangkan fungsi korektif merupakan fungsi yang memposisikan *public relations* sebagai *problem solver*, apabila pemerintahan mengalami suatu permasalahan atau sedang kritis dengan publiknya atau masyarakat, *public relation* harus berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut, fungsi *public relations* juga untuk membantu masyarakat yang kompleks dan pluralistic untuk menentukan keputusan dan menjalankan fungsi secara lebih efektif dengan memberikan kontribusi-kontribusi dan pemahaman bersama diantara kelompok ataupun sebuah institusi.

Public relations juga berfungsi untuk meyelaraskan kebijakan publik dan privat, melayani berbagai macam institusi di dalam masyarakat, seperti institusi bisnis, serikat perdagangan, agen pemerintahan, asosiasi sukarela, yayasan, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan institusi tersebut harus mengembangkan hubungan yang lebih efektif dengan banyak audiens atau publik yang berbeda-beda seperti karyawan, anggota dari kelompok-kelompok tertentu, konsumen, komunitas lokal suatu daerah, shareholder, dan institusi lain dengan masyarakat yang lebih luas. Manajemen dari sebuah institusi harus memahami secara mendalam sikap dan nilai yang dianut publik mereka dalam rangka meraih tujuan institusionalnya, tujuannya sendiri adalah mereka dibentuk oleh lingkungan eksternal. Praktisi *public relations* bertindak sebagai konselor bagi manajemen dan mediator, membantu menerjemahkan tujuan privat kedalam bahasa kebijakan dan tindakan yang masuk akal yang bisa dipahami oleh masyarakat.

Public relation sebagai alat penggerak manajemen moderen, *public relations*, secara struktural merupakan bagian integral dari kelembagaan atau organisasi yang diartikan sebagai *public relations* bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut. Fungsi ini sangat sejalan dengan dengan konsep humas yang berkembang kini adalah konsep yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah, diambil dari Howard Child, fungsi dasar *public relations* bukan untuk menampilkan pandangan organisasi atau seni sikap publik, meinkan

untuk melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian terhadap kepentingan masyarakat setiap aspek pribadi organisasi ataupun perilaku perusahaan yang mempunyai signifikan sosial, jadi *public relations* berfungsi untuk membantu organisasi melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya tempat organisasi tersebut beroperasi.

3. Humas Pemerintahan

Dilembaga pemerintahan, humas pemerintahan berperan sebagai penyampaian informasi tentang kebijakan-kebijakan penguasa kepada rakyatnya, menurut Siramesh (2004) menyatakan bahwa dalam sistem ini pers sangat dikontrol oleh pemerintahan sehingga pers berfungsi menyampaikan sebuah informasi yang datangnya dari pemerintahan itu sendiri untuk rakyat dan tidak sebaliknya, saat ini istilah *Public Relation* suntuik humas sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas.

Pada tahun 1972 humas atau *public relation* sudah mulai dikenal oleh masyarakat maka pada tahun 1987 maka berdirilah PERHUMAS atau persatuan humas dan juga munculnya APPRI asosiasi perusahaan *Public Relations* Indonesia diakarenakan kemajuan perekonomian pada zaman Soeharto, dan juga didukung pembangunan pada zaman itu yang sangat luar biasa. Humas pemerintahan tidak hanya digunakan sebagai penghubung kepentingan perusahaan dan stakeholder, ada beberapa faktor salah satu penunjang perkembangan humas pemerintahan yang ada di Indonesia menurut Vercic, Gruning, dan Gruning menyebutkan bahwa perkembangan humas dipengaruhi beberapa faktor pendorong yang dimana mendorong perkembangan humas di pemerintahan, seperti adanya dorongan dari demokratis kehidupan politik, industrialisasi, perkembangan teknologi komunikasi, privatisasi dan liberasi perekonomian, dan penerapan good governance atau tata kelola lembaga publik.

Sistem politik menjadi salah satu tolak ukur pendorong humas adalah demokrasi, menurut Sriramesh bahwa dalam pasar bebas dengan kompetisi yang sifatnya terbuka, strategi dari humas sendiri sangat diperlukan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Humas



juga berperan sebagai bagian yang dapat membangun sebuah citra lembaga bisnis, citra corporate, citra produk, dan citra suatu pemerintahan atau lembaga. Pada zaman cyber ini, humas lebih mudah dan praktis komunikasi dan riset dapat dilakukan melalui internet, privatisasi dan juga liberalisasi perekonomian menjadikan sebuah peluang bisnis lebih terbuka dan kompetitif.

Kedudukan dan peran humas dalam pemerintahan terdapat beberapa aspek yang mengatakan bahwa sistem humas dalam sistem pemerintahan terdapat adanya environment, boundary, input dan output, throughput dan feedback menurut Grunig dan Hunt (1984) bahwa pemerintahan atau organisasi merupakan suatu sistem yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas, hidup pada lingkungan tertentu saja. Pemerintahan dengan sistem yang tertutup diartikan bahwa mereka tidak berinteraksi sama sekali dengan publiknya atau masyarakat sekitar mereka, ketika sebuah sistem tidak bisa memenuhi kebutuhan dan serta menyerap keluarannya sendiri dengan kata lain ia (pemerintahan atau lembaga) memerlukan atau bergantung pada sistem lain atau lingkungannya untuk bisa bertahan hidup dan sistem tersebut secara otomatis telah berubah menjadi sistem yang terbuka.

Humas merupakan fungsi yang diperlukan oleh sebuah organisasi atau pemerintahan yang menganut sistem terbuka untuk mengelola hubungan yang baik atau interaksi dengan publik serta komunikasi yang baik dengan organisasi atau pemerintahan yang lain dan pihak – pihak luar, lanjutan menurut Grunig dan Hunt menyebut humas dengan istilah boundary spanner karena posisinya yang mengantarai atau berada diperbatasan manajemen pusat dengan bagian-bagian lain yang ada di dalam organisasi serta antara organisasi dan lingkungannya. Dengan demikian kehadiran humas pemerintahan menjadi salah satu yang diperlukan dalam pemerintahan karena fungsi dan perannya menjadi salah satu penghubung baik itu masyarakat ataupun organisasi pemerintahan yang ada di luar sana.

Humas juga mempunyai dua faktor yang memengaruhi keberadaanya dalam sebuah pemerintahan, yang pertama adalah besarkecilnya organisasi atau pemerintahannya mencangkup kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintahan atau organisasi tersebut, kedua adalah kemampuan kepemimpinan yang di pimpin oleh kepala bidah humas disuatu pemerintahan.

Peran dan kedudukan humas pemerintahan menurut Cutlip, Center, dan juga Broom (1985) menggambarkan kedudukan humas pemerintahan adalah sejajar dengan fungsi, tugas, dan peran mereka seperti organisasi lainya yang ada di pemerintahan. Menurut Grunig dan juga Hunt yang merajuk karya Broom dan Dozier mengidentifikasi bahwa peran humas pemerintahan sebagai teknisi dan peran manajer.

Menurut Dozier terdapat tiga jenis manajer dalam humas pemerintahan, yang pertama adalah expert preciber yaitu merupakan ahli dan penasihat bagi manajemen humas pemerintahan, kedua communication facilitator merupakan fasilitator komunikasi antara pemerintahan lain ataupun publiknya, terakhir ketiga problem sloving process fasilitator anggota humas yang dibentuk dalam tim yang dilibatkan untuk menyelesaikan suatu masalah.

4. Tata Kelola Lembaga Publik

United National Development Program menurut (Suprayitno 2004) mendefinisikan governance sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan- urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Ada tiga pilar utama yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan tata kelola lembaga publik ,yaitu Negara/pemerintah (the state), masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil (civil society), dan pasar atau dunia usaha.



Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Tata kelola lembaga publik yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Tata kelola lembaga publik juga tidak lepas dari dasar pelayanan prima, definisi layanan prima menurut Mukarom & Laksana mengatakan pelayanan prima dalam tata kelola lembaga publik suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintahan termasuk humas dalam tata kelola lembaga publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang kepegawaian no 33 tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil atau PNS selaku apatur pemerintahan memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, selaku pelayanan PNS harus memberikan pelayanan yang baik kepada publik atau masyarakatnya dan melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Jadi PNS, harus berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani bukan dilayani.

Pelayanan publik atau tata kelola lembaga publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerinahan pusat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (keputusan MENPAN no.81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, diperlukan bentuk pelayanan prima.

Tujuan pelayanan prima dalam tata kelola lembaga publik adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima dalam sektor publik atau masyarakat didasarkan pada

aksioma bahwa pelayana publik adalah suatu pemeberdayaan. Jika pelayanan pada sektor bisnis berorientasi suatu profit, pelayanan prim dalam tata kelola lembaga publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik.

Perbaikan pelayanan dalam tata kelola lembaga publik merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. Pelayanan prima dalam tata kelola lembaga publik bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan masyarakat atau membebani masyarakat, sehingga pemerinahan terutama humas dalam membangun sebuah kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Sebuah kepercayaan merupakan modal bagi kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

Memberikan suatu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dalam meningkatkan tata kelola lembaga publik, pemerintahan harus memenuhi dan memuaskan pelanggan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka seperti berikut, pertama memberdayakan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik, kedua membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Pelayanan prima dalam tata kelola lembaga publik akan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebagai pelanggan dan acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Sebagai penyedia pelayanan pemerintahan memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat, dan proses pelayanan yang seharusnya, berikut merupakan manfaat pelayanan prima dalam tata kelola lembaga publik, pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terutama humas kepada masyarakat, kedua acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan, dan ketiga merupakan acuan untuk pelayan, pelanggan, atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan 5W+1H (*why, when, with, whom, where, dan how*) pelayanan harus dilakukan.

METODE PENELITIAN

A. Subjek Penelitian



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kualitatif itu sendiri dikenal dengan istilah subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Karakteristik dari penelitian kualitatif pada pelaksanaannya, jenis penelitian ini terdapat ciri khusus yang membedakannya dengan metode penelitian yang lain. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut, yang pertama adalah lingkungan alam sebagai sumber data biasanya sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lingkungan alamiah, yaitu berbagai peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. Proses riset dilakukan dengan berinteraksi langsung melalui pengamatan, pencatatan, dan menggali sumber informasi yang berhubungan dengan peristiwa yang diteliti. proses tersebut, peneliti mempelajari proses penemuan dengan mencatat, melakukan analisis, membuat laporan, dan menyimpulkan kegiatan riset tersebut. Hasil temuan dilapangan yang masih berbentuk teori, prinsip, dan konsep, akan dikembangkan lagi. Terakhir karakteristik kelima mengutamakan makna Dalam penelitian kualitatif, makna yang disampaikan berhubungan dengan persepsi orang dengan suatu kejadian yang diteliti. subjek pada penelitian ini adalah dua orang perwakilan dari Humas pemerintahan kota Pekalongan, satu narasumber dari DIKOMINFO kota Pekalongan, dan empat narasumber dari masyarakat lokal kota Pekalongan. Narasumber

pertama adalah Bapak Restu, beliau berumur 45 tahun, dan menjabat sebagai kepala Humas protokol kota Pekalongan, narasumber yang kedua adalah Bapak Anwar, beliau berumur 27 tahun yang menjabat sebagai sekretaris daerah Humas kota Pekalongan.

Narasumber yang ketiga adalah Ibu Nurul, beliau berumur 42 tahun, dan beliau menjabat sebagai kepala bidang informasi dan informatika PPID DIKOMINFO kota Pekalongan, narasumber ketujuh adalah Abi Pramana mahasiswa 21 tahun, berkuliah di Universitas Diponegoro Semarang, Narasumber kedelapan bernama Nuriah Irsani pekerjaan karyawan pabrik berumur 17 tahun, Narasumber kesembilan adalah Abdul Kholiq berumur 50 tahun pekerjaan pengemudi ojek online di kota Pekalongan, Narasumber kesepuluh yang terakhir bernama Akhlum Nur Alam berumur 30 tahun pekerjaan pengemudi ojek online di kota Pekalongan.

B. Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2011) penelitian kualitatif deskriptif adalah metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian / identifikasi masalah penelitian. Hal ini disebabkan tujuan dari



penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/identifikasi masalah.

Dalam penelitian ini, pada umumnya akan terjadi tiga hal kemungkinan masalah yang dibawa oleh peneliti ke penelitian tersebut, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu, pertama masalah yang dibawa peneliti adalah masalah tetap, yaitu judul dari penelitian deskriptif kualitatif mulai awal pengajuan proposal hingga akhir laporan tetap sama, kedua merupakan masalah yang diajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan, dalam hal ini tidak terlalu banyak hal yang berubah, hanya butuh penyempurnaan saja. Peneliti menggunakan sistem wawancara berbentuk FGD (Focus Group Discussion) FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Penggunaan FGD untuk mewawancarai pihak Humas pemerintahan kota Pekalongan.

Peneliti juga menggunakan teknik wawancara terstruktur, kepada pihak DIKOMINFO kota Pekalongan dan juga empat narasumber mengenai topik penelitian peneliti. Wawancara menurut Sugiyono (2011) menurut Sugiyono wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon.

Sebelum melakukan penelitian peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan kepada Humas kota Pekalongan, DIKOMINFO kota Pekalongan, dan juga warga lokal kota Pekalongan, dalam mengambil data tersebut peneliti menggunakan sistem FGD kepada ketua Humas protokol dan juga sekretaris daerah dari pihak Humas peneliti memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

Serta melakukan wawancara terstruktur secara langsung kepada Kepala bidang informasi dan PPID DIKOMINFO kota Pekalongan, dan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat kota Pekalongan.

C. Jenis Data

Sumber Data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari : sumber data primer dan sumber data sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Data ini diambil dari jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dari karyawan atau staff Humas Pemerintahan Kota Pekalongan

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kanto-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data



Menurut Sugiyono (2011) dalam bukunya mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa setting, berbagai sumber, dan juga berbagai cara. Bisa dilihat dari setting-nya data dapat didapatkan dengan cara setting secara ilmiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen di rumah dengan beberapa responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dan juga FGD (Focus Group Discussion).

Menurut Moleong wawancara merupakan, percakapan dengan tujuan tertentu. Yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya).

Sedangkan FGD menurut Coloumbia dan Hening mereka mengemukakan bahwa Focus Grup Discussion adalah wawancara dari sekelompok kecil yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang tugas mereka salah satunya mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan mengenai hal yang dianggap penting namun berhubungan dengan topik diskusi yang sedang dibahas.

Dalam penelitian tersebut peneliti juga melakukan observasi terhadap media yang dipakai oleh Humas pemerintahan kota Pekalongan, bagaimana cara mereka untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dalam mengambil data wawancara seperti wawancara dan juga berfoto bersama para narasumber yang peneliti wawancara selama berada di kota Pekalongan

E. Teknis Analisis Data

Analisis menurut Sugiyono (2011) merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Pada akhirnya mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara dengan bentuk FGD (Focus Grup Discussion) untuk Humas pemerintahan kota Pekalongan dan wawancara terstruktur untuk DIKOMINFO kota Pekalongan dan juga warga lokal kota Pekalongan yang sering menerima informasi yang datang dari Humas dan juga DIKOMINFO kota Pekalongan.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan reduksi data, menurut Sugiyono reduksi data adalah merangkum data yang kita dapatkan melalui teknik wawancara menurut Sugiyono (2011) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dari wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan data yang sudah dikumpulkan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat terus berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Hasil penelitian yang didapat akan dicocokkan kembali terhadap data yang didapat agar peneliti mendapatkan hasil kesimpulan yang terpercaya yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011).

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN

1. Kota Pekalongan



Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat dan Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.

Kota Pekalongan berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat Semarang. Kota Pekalongan mendapat julukan kota batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Batik telah menjadi nafas kehidupan masyarakat Pekalongan dan terbukti tetap eksis dan tidak menyerah pada perkembangan jaman, sekaligus menunjukkan keuletan dan keluwesan masyarakatnya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran baru.

2. Humas Pemerintahan Kota Pekalongan

Humas kota Pekalongan merupakan ujung tombak keberhasilan hubungan antara pemerintahan kota Pekalongan dan masyarakat kota Pekalongan sesuai dengan perda bahwa Humas kota Pekalongan adalah penyambung masyarakat dengan Walikota dan wakil Walikota yang tugasnya membantu memberikan sebuah informasi keluar mengenai kegiatan yang dilakukan ataupun tata kelola yang sedang dijalankan oleh Walikota dan wakil Walikota dalam membangun kota Pekalongan yang baik.

Selain itu Humas juga mempublikasikan setiap kegiatan dan keberhasilan suatu proyek yang sudah disusun oleh Walikota dan jajarannya, contoh keberhasilan yang dipublikasikan seperti pembangunan saluran untuk menanggulangi banjir di beberapa wilayah yang ada di Pekalongan, Humas Pekalongan juga bekerja

dengan membangun hubungan baik dengan para masyarakatnya.

Tata kelola yang dibuat oleh pihak Humas pemerintahan kota Pekalongan sendiri adalah bagaimana menciptakan suatu kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka juga bisa digunakan sebagai lahan untuk permasalahan yang ada pada masyarakat di kota Pekalongan. Bukan hanya masalah saja tetapi bagaimana para Humas mau mendengarkan masyarakat yang mempunyai usulan tentang tata kelola yang lebih baik, Humas juga harus cepat dan juga merespon permasalahan yang terjadi ataupun tanggapan mengenai tata kelola kota Pekalongan untuk yang lebih baik lagi.

Bukan hanya untuk tata kelola saja tetapi Humas juga dapat digunakan sebagai salah satu dinas yang dapat mensosialisasikan karya atau usaha kecil dari warga kota Pekalongan, selaku Humas sendiri harus mengunggah hasil karya dari kota Pekalongan seperti mulai dari hasil karya, wisata, dan juga kuliner dari kota Pekalongan, sehingga pemerintah membuat buku mencakup mengenai kota Pekalongan mengenai wisata, kuliner, dan budaya yang ada di kota Pekalongan.

Selain itu Humas kota Pekalongan dibagi menjadi dua subbag yaitu bagian protokol dan juga bagian informasi dan dokumentasi, bagian protokol bekerja dalam kegiatan yang dilakukan oleh Walikota sedangkan bagian informasi dan dokumentasi hanya memberikan informasi dan mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh Walikota mengenai pembangunan dan juga menaruh informasi tersebut di media yang digunakan untuk melakukan publikasi seperti media cetak lokal dan elektronik lokal.

Namun Humas Pemerintahan kota Pekalongan sudah berganti nama menjadi Protokol komunikasi pimpinan kota Pekalongan, yang dimana kerjanya sama dengan Humas namun protokol hanya memberikan dokumentasi dan informasi dari sisi pemerintahan untuk masyarakat, dan layanan informasi publik sudah diserahkan semua kepada DIKOMINFO untuk informasi publik yang lebih luas lagi.

3. DIKOMINFO Kota Pekalongan



Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekalongan adalah salah satu Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika. Secara legal formal, Diskominfo Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Perda Nomor 1 Tahun 2011 ini merupakan revisi atau evaluasi atas berbagai Perda tahun 2008 yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Perda Nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 Tahun 2008).

Sekalipun secara nomenklatur, pembentukan Diskominfo berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun tahun 2011 ini merupakan Dinas baru, namun demikian secara operasional sebenarnya urusan pemerintahan yang terkait dengan komunikasi dan informatika sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan nama dan level kelembagaan yang berbeda.

Sebelum terbentuknya Diskominfo tahun 2011 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh 2 (dua) unit kelembagaan, yaitu Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) pada Sekretariat Daerah (Eselon III-A)., dan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika dan pariwisata Budaya (Dishubkominfoarbud).

Sejalan dengan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, maka kedua lembaga tersebut kemudian 'dimerger' menjadi satu dan berubah nama menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga Dishubkominfoarbud, berubah menjadi Dishubparbud saja, dan kelembagaan Bagian PDE pada Setda di tiadakan.

Perubahan terkait kelembagaan yang mengelola urusan komunikasi dan informatika di Kota Pekalongan mengalami beberapa dinamika. Sebelum tahun 2008 sendiri, penyelenggaraan urusan Kominfo, terutama yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ditangani oleh Bidang Data Elektronik yang berada atau menjadi satu dengan Badan Arsip, Data Elektornik dan Perpustakaan Daerah (Bardepusda).

ANALISIS

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Humas dan juga DIKOMINFO juga berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan oleh teknisi komunikasi masing-masing organisasi pemerintahan yaitu Humas dan DIKOMINFO, pada gambar dibawah ini merupakan contoh situs resmi dari Humas dan DIKOMINFO mengenai acara ataupun perlakuan kebijakan yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota. Dalam situs resmi ini Humas dan juga DIKOMINFO mengunggah berita mengenai keberhasilan dari pemimpin ataupun keberhasilan program yang mampu meminimalisirkan keadaan yang dialami oleh masyarakat kota Pekalongan terkini mengenai pembangunan infrastruktur kota Pekalongan, serta dalam situs resmi ini Humas dan juga DIKOMINFO memberikan informasi mengenai keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Pekalongan. salah satunya adalah keberhasilan Walikota kota Pekalongan dalam pelayanan publik yang terus membaik, sehingga Walikota mendapatkan penghargaan. Dalam situs resmi DIKOMINFO kota Pekalongan, mereka menulis mengenai keberhasilan program yang berlaku untuk membantu masyarakat, gerakan ini juga sangat membantu bagaimana proses untuk mengimplementasikan tata kelola lembaga publik adalah memberikan pelayanan publik yang dikerahkan oleh pemerintahan kota Pekalongan. selain keberhasilan DIKOMINFO juga memberikan informasi bukan pemerintahan saja tetapi juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakatnya. Salah satunya bagaimana DIKOMINFO memberikan informasi mengenai bagaimana masyarakat akan dikenalkan mengenai smart city untuk mendukung dan mengimplementasikan tata kelola lembaga publik di kota Pekalongan.

Media sosial yang digunakan Humas Pemerintahan juga memberikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Walikota dan juga Wakil Walikota seperti yang Peneliti katakan bahwa mereka lebih fokus terhadap pimpinan mereka juga memberikan informasi mengenai kegiatan pimpinan kota Pekalongan, dilihat dari postingan atau unduhan dari informasi yang diunggah dalam akun media sosial Humas Pemerintahan dapat dilihat bahwa pemerintahan ingin menjalin hubungan dengan menggunakan cara memberikan bukti yang baik dan positif kepada masyarakat mengenai citra dari pimpinan kota Pekalongan itu sendiri.

Selain itu Humas Pemerintahan dan juga DIKOMINFO adalah bagian yang saling bekerja sama namun dalam penampain informasi DIKOMINFO memberikan informasi mereka secara luas dengan adanya media sosial mereka juga lebih leluasa dan sangat cekatan dalam mengambil suatu informasi mengenai peristiwa yang terjadi hingga kebijakan-kebijakan yang berlaku di kota Pekalongan. Contoh dari informasi yang diberikan adalah kenaikan pendapatan biaya ekspor dan import di kota Pekalongan sehingga menguntungkan masyarakat.

Dalam media sosial twitter mereka juga memberikan informasi berupa membuat seminar yang diperutukan untuk siswa siswi sekolah menengah pertama dan juga menengah atas mereka bekerja sama dengan BNN kota pekalongan mengenai bahaya dari pemakaian narkoba di Indonesia, dan mereka juga menjelaskan mengapa acara itu diadakan untuk menindak dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya dari narkoba itu sendiri.

Karena mereka miliki para ahli dalam lingkungan organisasi mereka dalam lingkup kerja Humas dan DIKOMINFO kota Pekalongan seperti penasihat ahli yang peran, fungsi, dan tugasnya adalah mereka merupakan orang yang ditunjuk untuk memecahkan suatu permasalahan antara masyarakat dan juga pemerintahan yang terjadi kepada masyarakat mengenai suatu infrastruktur di kota Pekalongan yang kurang berjalan ataupun bencana yang sedang mereka alami biasanya masyarakat akan secara langsung datang untuk mengutarakan permasalahan tersebut ataupun menggunakan media yang digunakan oleh Humas untuk kepentingan permasalahan masyarakat penasihat ahli dalam Humas dan juga DIKOMINFO memberikan solusi yang terbaik dengan membuat program yang dimana program tersebut akan diimplementasikan agar masalah yang sama tidak terjadi lagi karena adanya program yang sudah dinuat dari Humas dan DIKOMINFO kota Pekalongan. Pada penelitian ini peneliti juga menyipkan dokumen mengenai situs pengadilan kota Pekalongan.

Bukan hanya penasihat ahli saja yang bekerja namun dibalik itu terdapat fasilitator komunikasi yang fungsi, tugas, dan peranya adalah sebagai mediator antar permasalahan masyarakat dan juga pemerintahan, mereka mencairkan suasana antara pemerintahan dan juga masyarakat itu sendiri, dan mereka merupakan penghubung antara masyarakat dan juga pemerintahan dan membantu pihak Humas ataupun DIKOMINFO terutama manajemen untuk mendengar keluhan dan harapan masyarakat untuk pemerintahan kota Pekalongan yang lebih baik laigi kedepanya.

Mereka juga harus bisa menjabarkan keinginan, kebijakan, dari publik ke pemerintahan sehingga timbulnya kepercayaan dan adanya timbal balik antara masyarakat dan juga pemerintahan maupun antara organisasi ke pemerintahan begitupun sebaliknya, timbal balik yang diberikan masyarakat kepada Humas DAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DIKOMINFO adalah adanya dukungan terhadap sistem yang berlaku pada pemerintahan dan masyarakat lebih percaya terhadap pemerintahan karena mereka mendengar permasalahan dari masyarakat.

Selain itu juga terdapat fasilitator pemecah masalah dalam Humas pemerintahan Kota Pekalongan dimana fungsi, tugas, dan peran mereka adalah memecahkan dan membantu Humas jika bidang Humas sedang mengalami suatu permasalahan yang kritis dan mereka juga bertindak sebagai konsultan yang dapat memecahkan suatu permasalahan Humas kepada publiknya ataupun pemerintahan ke publik. Contohnya adalah bagaimana Humas dapat menjelaskan tentang pemasukan dan pengeluaran Walikota dalam pembangunan gazebo di alun-alun kota Pekalongan yang anggarannya cukup mahal atau boros.

Terakhir ada teknisi komunikasi teknisi komunikasi dalam Humas pemerintahan kota Pekalongan bukan seorang engineering alat komunikasi yang digunakan sebagai fasilitas Humas untuk membuat hubungan kepada publiknya, teknisi komunikasi merupakan journalist in resident diartikan mereka harus terjun kelapangan langsung untuk mendapatkan suatu informasi dan mendokumentasikannya.

Informasi dan dokumentasi yang mereka ambil merupakan acara atau kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan atau acara-acara yang digelar setiap tahunnya.

Teori sistem sendiri juga berperan penting dalam majunya Humas pemerintahan kota Pekalongan dan DIKOMINFO bagaimana pemerintah menggunakan sebuah sistem yang semua masyarakat harus mengetahui sistem yang berlaku pada pemerintahan dan mendukung sistem pemerintahan tersebut, teori ini juga berbicara mengenai fungsi boundary spanning yaitu bagaimana pemerintahan membuat suatu hubungan kepada publiknya atau masyarakatnya.

Seperti pembahasan dan juga gambar yang sudah disisipkan oleh peneliti adalah bagaimana Humas pemerintahan kota Pekalongan membuat sistem untuk diketahui oleh masyarakat kota Pekalongan itu sendiri, dan membuat media pendukung untuk mengimplementasikan tata kelola yang publik yang sudah ada terdapat pada Undang-undang negara tahun 2009 mengenai pelayanan publik.

Hasil Analisis

Dapat dikatakan bahwa Humas Pemerintahan sendiri memberikan begitu banyak kemudahan bagimasyarakatnya dan juga mereka juga tidak melihat perbedaan masyarakat yang diberikan informasi dari Humas kepada masyarakat di kota Pekalongan, karena adanya sifat public relations dan boundary spanning dalam teori sistem menjadikan mereka dapat berhubungan dan berkomunikasi baik dengan masyarakatnya dan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakatnya.

Dengan pelayanan ppid sangat membantu masyarakat dalam mencari informasi yang diberikan oleh Humas Pemerintahan kepada masyarakat dan Humas Pemerintahan juga langsung memberikan dukungan penuh dengan sistem pemerintahan untu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan gerakan good governance, ini ditandai dengan penghargaan yang diberikan kepada negara kepada kota Pekalongan dalam memberikan layanan publik yang baik secara tiga tahun berturut-turut.

Humas Pemerintahan juga dibantu peran oleh DIKOMINFO dikarenakan Humas Pemerintahan berubah sistem pada tanggal 1 Januari 2020, dan Humas dipindahkan sebagian kepada DIKOMINFO Kota Pekalongan, pekerjaan mereka sama dengan Humas, namun pemberitahuan nformasi mereka jauh lebih luas karena berfokus pada setiap golongan dan juga dinas pemerintahan yang ada di Kota Pekalongan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sama dengan Humas Pemerintahan bahwa DIKOMINFO mempunyai para ahli yang mau mengambil informasi atau mendokumentasi hasil dari sistem pemerintahan yang berlaku, dan mereka akan memasukkan semua data pada situs resmi mereka yang memudahkan masyarakat, dan mereka juga memberikan informasi bukan lewat media atau situs tetapi juga melalui banner atau baliho yang mereka pasang di wilayah kota Pekalongan yang terpencil yang masyarakatnya belum mengenal teknologi yang sekarang berkembang. Pelayanan yang diberikan dari DIKOMINFO sendiri seperti pembuatan call center dan juga aplikasi yang membantu masyarakat dimana aplikasi ini merupakan hasil kerjasama antar dinas-dinas yang ada di kota Pekalongan.

Bukan hanya dalam membangun aplikasi saja tetapi juga membantu masyarakat dalam mencari informasi lowongan pekerjaan yang diadakan oleh setiap dinas di kota Pekalongan, informasi diberikan melalui media cetak dan juga media sosial DIKOMINFO.

Hasil Analisa & Pembahasan

Dari hasil pembahasan dan juga penelitian ini dikatakan mengenai Humas pemerintahan kota Pekalongan dalam mengimplementasikan tata kelola lembaga publik dalam kota Pekalongan sangatlah berjalan dengan baik, terutama pada bagian dimana mereka ingin mengimplementasikan suatu pelayanan yang bisa membantu kehidupan masyarakat di kota Pekalongan. perlu diketahui jika Pekalongan merupakan kota yang kecil dan diapit oleh kota yang besar dan daerah di pulau Jawa yang cukup besar keberadaannya itulah yang membuat mereka tidak mau kalah saing dengan kota besar lainnya.

Mereka juga membuat sejumlah media untuk memudahkan masyarakat untuk melihat informasi yang dibagikan oleh Humas dan juga DIKOMINFO media yang

digunakan berupa sosial media seperti twitter, instagram, dan lain-lain

Humas juga memberikan informasi tersebut dikarenakan adanya peraturan mengenai pelayanan publik yang sudah terdapat di undang-undang, yang dimana mereka tidak melihat dari bagaimana masyarakat tersebut diartikan mereka sangat terbuka kepada masyarakat kecil ataupun masyarakat menengah keatas. Humas juga dibantu oleh SDM yang sangat baik dikarenakan dibagi menjadi dua bagian yaitu protokol dan juga dokumentasi mereka bekerja sama memberikan informasi terbaru.

Humas pun juga membuat situs untuk menuntaskan permasalahan masyarakat di kota Pekalongan, dengan dibangunnya situs ini sangat berguna bagi pemerintahan terutama Humas karena permasalahan akan segera cepat ditanggapi dan langsung dilaporkan kepada pihak yang terkait untuk memecahkan masalah tersebut dan situs itu juga dapat memberikan masukan-masukan yang penting untuk menjadikan kota Pekalongan yang lebih baik lagi secara pemerintahan.

Humas juga bekerja sama dengan DIKOMINFO kota Pekalongan, dinas ini membantu Humas dalam segi dokumentasi dan juga tata kelola lembaga publik sebagai tolak ukur kota Pekalongan dalam mengembangkan dan memajukan tata kelola lembaga publik di kota Pekalongan.

DIKOMINFO merupakan dinas yang membantu Humas dalam memberikan informasi secara informatif dan juga komunikatif. Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2008 mengenai pelayanan publik, salah satu pasal mengatakan bahwa kota harus bisa memberikan data data secara real mengenai pemerintahan kota tersebut.

Bisa mengambil garis besar bahwa DIKOMINFO merupakan dinas yang menjadikan tata kelola lembaga publik menjadi salah satu tolak ukur untuk menjadikan kota Pekalongan menjadi kota yang baik, berinovasi, dan juga maju dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintahan dan pengembangannya. Dinas ini juga mendukung gerakan ini sudah sejak lama dan mereka juga membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas tanpa melihat latar belakang mereka.

Kedua organisasi ini juga memberikan pelayanan yang sepenuh hati kepada masyarakatnya terutama masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi rendah sekalipun mereka juga membantu mereka dalam memberikan informasi seperti layanan beras gratia tau pengobatan gratis yang diadakan oleh dinas pemerintahan yang ada di kota Pekalongan.

Mereka juga terbuka dengan data – data seperti contoh gaji Walikota dan anggaran desa yang diterima mereka pajang melalui media banner atau baliho yang mereka sebar keempat titik wilayah kota Pekalongan, dan masyarakat lebih tahu mengenai pekerjaan apa yang dikerjakan pemerintah selama ini. DIKOMINFO juga memberikan data informasi kepada masyarakat dimana data tersebut bisa diakses melalui situs PPID kota pekalongan yang didalamnya terdapat data – data pemerintahan yang bisa diakses kecuali yang dikecualikan ataupun masyarakat bisa datang sendiri ke DIKOMINFO untuk mendapatkan data tersebut.

Peneliti dapat menarik garis besar mengenai pernyataan masyarakat mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti, bahwa mereka sangat bersyukur dikarenakan adanya Humas pemerintahan kota Pekalongan dikarenakan mereka terbuka dengan segala informasi dari dalam pemerintahan atau transparan kepada masyarakat dan Humas juga bersifat open to public dikarenakan mereka mau menerima kritik dan saran dari masyarakat kepada pemerintahan serta mereka mau menerima dan mendengarkan permasalahan yang sedang terjadi kepada masyarakat.

Selain sifat yang transparan kepada masyarakat dan mau mendengar

permasalahan masyarakat mereka juga membantu masyarakat yang mempunyai usaha seperti kuliner ataupun pengerajin batik Humas mau membantu dalam mempromosikan usaha-usaha mereka, dan usaha mereka dikenal oleh banyak orang bukan dari warga lokal saja tetapi juga masyarakat luar Pekalongan.

Humas dan juga DIKOMINFO berusaha untuk menjadikan kota Pekalongan yang terbaik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya yang terbaik meskipun kota kecil mereka ingin kota Pekalongan dianggap menjadi kota yang buka terkenal akan batiknya saja tetapi juga akan implementasi layanan publik yang baik bagi masyarakatnya.

Ini merupakan bentuk nyata dari teori sistem yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikarenakan pemerintahan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mengimplementasikan tata kelola lembaga publik, dan Humas Pemerintahan dan DIKOMINFO berupaya mewujudkan gerakan in karena sudah tertulis pada undang-undang pemerintahan kota. Hasilnya masyarakat banyak dibantu oleh Humas dan Juga DIKOMINFO dalam segi memperkenalkan kota Pekalongan di mata dunia atau diluar kota Pekalongan itu sendiri.

Dengan pemerintah mendengar opini masyarakat itu juga dapat menimbulkan hubungan yang baik antara masyarakat dan juga Pemerintahan karena adanya hubungan sosial, yang terjalin dari komunikasi dua arah antar masyarakat dan juga Pemerintahan.

PENUTUP

SIMPULAN

Simpulan pertama adalah bagaimana peranan humas itu sangat dibutuhkan bukan hanya humas saja tetapi humas juga bekerjasama dengan DIKOMINFO yang membantu memberikan informasi dan juga dokumentasi mengenai pekerjaan pemerintah, dan mereka juga membantu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendokumentasi keberhasilan keberhasilan Walikota dalam membangun kota Pekalongan yang sangat baik. Karena sifat mereka yang sangat transparan kepada masyarakat menjadikan masyarakat mempunyai kepercayaan, dukungan, dan menghargai pekerjaan yang di kerjakan oleh pemerintah kota Pekalongan.

Simpulan kedua fungsi, peran, dan tugas dari keempat fasilitator yang ada di humas kota Pekalongan seperti penasihat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator pemecah masalah, dan teknisi komunikasi sangatlah mendukung pekerjaan humas dan juga DIKOMINFO dikarenakan kedua organisasi ini mempunyai beberapa bagian yang mempunyai jalinan kerja sama dengan media lokal mulai dari media cetak dan elektronik lokal serta bagian yang memasukan dokumentasi dan juga informasi melalui situs resmi mereka. Mereka juga terbuka mengenai data-data yang diinginkan oleh masyarakat terutama pada masyarakat atau mahasiswa yang ingin melakukan observasi atau penelitian yang membutuhkan data – data dari mereka, bagian humas dan DIKOMINFO membuka data terkecuali data-data yang dikecualikan.

Simpulan ketiga masyarakat juga sangat berterima kasih dikarenakan adanya humas dan juga DIKOMINFO yang membantu mempromosikan usaha kecil mereka mulai dari kuliner hingga pengerajinan batik sekalipun, dikarenakan Pekalongan merupakan kota kecil yang hidup tidak berarti kota kecil tidak bisa berbuat apa-apa mereka bisa membuat sesuatu yang bisa menghasilkan dan juga diingat oleh masyarakat luar. Serta masyarakat juga sangat bisa terbuka kepada humas pemerintahan dengan menuliskan permasalahan mereka yang berhubungan dengan pembangunan dan layanan, humas juga mau mendengarkan masalah dan masukan dari masyarakat untuk menjadikan kota Pekalongan kota yang baik, maju, dan berinovatif serta kedua bagian ini humas dan DIKOMINFO juga

mendukung peran tata kelola lembaga publik di kota Pekalongan.

Hasil dari simpulan ini juga tidak terlpas dari teori sistem yang digunakan penulis dimana teori sistem merupakan teori Public Relations yang sangat berhubungan dengan organisasi dan para publiknya karena sifatnya yang membutuhkan hubungan sosial dengan masyarakat mapun pemerintahan kota yang ada di wilayah Indonesia, dengan adanya fungsi *boundary spanning* dapat menghasilkan pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena sistem mereka terbuka Humas Protokol dan DIKOMINFO dapat menyebarkan dokumentasi dan juga informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai keseriusan mereka dalam memajukan tata kelola lembaga publik bagi kota Pekalongan, dan gerakan ini juga didukung oleh pelayanan publik yang baik dan juga undang-undang pemerintahan kota mengenai tata kelola negara atau wilayah di Indonesia.

Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan studi Ilmu Komunikasi yang membahas tentang fungsi, tugas, dan juga peran mengenai humas pemerintahan kota Pekalongan dalam mengimplementasikan tata kelola lembaga publik yang baik kepada masyarakat loka kota Pekalongan atau bisa dibilang studi mengenai *Government Relation*, dan *Good Governance* selain itu, semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fungsi, tugas, dan juga peran dari humas pemerintahan kota Pekalongan ataupun kota-kota yang ada di Indonesia

Peneliti juga berharap peneliti selanjutnya juga menggunakan teori *Public Relation* yaitu teori sistem dengan fungsi *boundary spanning*, Penelitian ini kedepannya juga akan menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian mengenai tata kelola

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lembaga publik atau *Good Government* mengenai suatu kota entah kota kecil ataupun kota besar.

Saran Paktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, referensi dan dapat menjadi pengetahuan, khususnya untuk para peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian mengenai tata kelola lembaga publik yang terfokus pada fungsi, tugas, dan peran humas pemerintahan untuk membangun tata kelola lembaga publik yang baik untuk suatu daerah terutama humas pemerintahan yang bekerja untuk mengimplmentasikan tata kelola lembaga publik yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Aditrianto, Ridho. (2016). *“Strategi Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Grobogan Dalam Melaksanakan Publicitas”*. Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah.

Astuty Sri.,et al. (2017) *“Analisis Fungsi dan Peran Humas Dalam Upaya Implementasi Good Governance (Studi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)”* Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Marketing Communication Vol. 2 No. 1, 1 Maret 2017

Abidin, Yusuf Zainal. (2016), *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep dan Aplikasi*, Bandung, Penerbit : Pustaka Setia.

Butterick, Keith. (2012). *Pengantar Public Relations: Teori dan Prakti*. Jakarta. Penerbit : PT Raja Grafindo Persada.

Bimasakti,Firman. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik*

Government di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang) Vol.6 No. 3 2017

DINKOMINFO Kota Pekalongan. (n,d), sejarah singkat DINKOMINFO, <https://kominfo.pekalongankota.go.id/>, diakses pada 07 Januari 2020

Grunig J.E, and Hunt T. (1984), *Managing Public Relation, For Worth*, Penerbit : Rine Hart & Witson.

Herlina,Sisilia. (2015) *“Strategi Komunikasi Humas dalam Membentuk Citra Pemerintahan di Kota Malang “*, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol 4 No.3, 2015.

Humas Pemerintahan Kota Pekalongan,(n,d). Sejarah singkat kota Pekalongan, <https://humas.pekalongankota.go.id/>, diakses pada 05 Januari 2020

Kriyantono,Rachmat. (2014). *Teori – Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik*, Jakarta, Penerbit : Kencana.

Kolondam,Helly . (2014) *“Pengaruh Good Goverance Terhadap Implemntasi Kebijakan Tata Kota di Kota Manado”* Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal 2014.

Larasati, Belinda Devi. (2016) *“Peran Humas sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan”*, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol 19 No.1, Juli 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Luqman, Yanuar. (2014) “Peran dan Posisi Hubungan Masyarakat Sebagai Fungsi Manajemen Perguruan Tinggi Negeri Semarang”, Jurnal Interaksi, Vol. 2 No. 1, Januari 2013: 3-10

Mukarom., et al. (2014), *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung, Penerbit : CV. Pustaka Setian.

Ruslan, Rosadi. (199). *Manajemen Humas dan Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*, Bandung, Penerbit : Raja Grafindo Persada.

Surakarta. Riyantie, Mayang. (2011), “Peranan Humas Pemerinta Kabupaten Subang Melalui Konfrensi Pers Dalam Menyampaikan Informasi Korupsi”, Skripsi Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas Universitas Komputer Indonesia Bandung.

Sriramesh, Krishnamurthy. (2004). *The Global Public Relations Handbook Theory, Research, and Practice*, NewYork, Penerbit : Routledge.

Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta, Penerbit : Alfabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.